

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan

pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Penelitian ini mengkaji dan memfokuskan tentang kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa, dengan lokus utama dari penelitian ini adalah di Kantor Desa Sidomulyo. Keberhasilan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan desa. Pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa menuju masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

Salah satu peran kepala desa adalah menggerakkan pembangunan infrastruktur desa demi terciptanya kehidupan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat desa. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh kepala desa adalah dengan mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan desa.

Keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan infrastruktur di suatu desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan kinerja kepala desa sebagai pemimpin dalam suatu wilayah pedesaan, yang menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, mengkomunikasikan, mengorganisasikan, dan melaksanakan. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur desa.

Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di desa, agar program pembangunan infrastruktur desa berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu juga maka perlu adanya kepemimpinan kepala desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dari proses pembangunan desa.

Kinerja Kepala Desa Sidomulyo dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur desa sudah dinilai sesuai dengan yang diharapkan dan sudah terlaksana secara efektif dan efisien sehingga masyarakat di desa Sidomulyo sudah sepenuhnya merasakan pembangunan infrastruktur desa dengan baik. Namun, pelaksanaan pembangunan suatu desa agar terlaksana secara efektif dan efisien harus didukung dengan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Dan banyak masyarakat sudah ikut peran aktif berpartisipasi perihal pembangunan desa.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang baik antara kepala desa dan masyarakat merupakan tonggak dalam keberhasilan pembangunan desa. Peran kepala desa dalam memberikan motivasi dan pengarahan bagi masyarakat terkait pembangunan desa untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh kepala desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hepri Candra yang berjudul “ Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Panggak Darat yang membahas tentang seluruh masyarakat Desa Panggak Darat diharapkan untuk lebih meningkatkan partisipasinya (keikutsertaannya) baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa Panggak Darat Kecamatan

Lingga Kabupaten Lingga, dan Pemerintah Desa Panggak Darat, diharapkan agar mempengaruhi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur khususnya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dan dalam penelitian tersebut dijelaskan juga, bahwa faktor waktu yang dimiliki oleh masyarakat juga ikut menentukan partisipasinya. Untuk itu mungkin perlu dirubah mekanisme yang berbeda pada taraf pelaksanaan pembangunan. Dan di temukan gejala-gejala saat penelitian yaitu adanya anggapan masyarakat bahwa pembangunan desa adalah merupakan tugas aparat atau gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat untuk turut serta masih kurang dengan alasan ada pekerjaan lain yang mereka pentingkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal dalam hal ini partisipasi masyarakat seperti saran, pikiran, dan tenaga mereka sangat di butuhkan.

Dari rekomendasi yang terdapat pada penelitian tersebut ialah bahwa di dalam desa yang akah dibahas dan dilihat bagaiman sikap partisipasi masyarakat. Dengan adanya efektivitas kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat akan lebih membuat pembangunan infrastruktur desa yang berlangsung dapat berjalan secara efektif dan efisien. Karena kepala desa sebagai seorang sebagai motivator, mengajak dan mengarahkan masyarakat utuk berpartisipasi didalam pembangunan infrastruktur desa, dan partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan didalam pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa** “.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di desa Sidomulyo Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kepala Desa

Sebagai salah satu dalam menganalisis Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan masukan dan saran yang akan dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat di desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir secara ilmiah dan sistematis dalam suatu karya ilmiah mengenai Efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait Efektivitas Kepemimpinan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langsung kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori atau landasan teori yang terkait dengan penelitian ini. Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Menurut Neuman, teori merupakan suatu sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengorganisasikan berbagai pengetahuan manusia tentang dunia sosial sehingga mempermudah pemahaman manusia tentang dunia sosial.

Berdasarkan definisi dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa landasan teori atau kerangka teori merupakan titik tolak atau landasan berpikir dan menyoroti atau memecahkan masalah. Pedoman teoritis yang membantu memuat pokok-pokok pikiran dan menggambarkan dari sudut pandang mana tersebut disoroti.

2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Kedayagunaan, ketepatangunaan, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat.¹Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

¹ KBBI, <http://KBBI.Web.Id/Efektivitas.html> diakses pada tanggal 13 juli pukul 14.00

Keberhasilan tugas kepala desa dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segala sumber daya kantor dalam mencapai tujuan adalah sebagai sumber daya kantor dalam mencapai tujuan adalah sebagai indikator dari keefektifan kepala desa mampu menciptakan interaksi kerja yang dilangsungkan dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan bagi pegawai. Kepala desa sebagai manajer harus menguasai seni utama dalam profesinya, yaitu seni mengelola kerja. Ada tiga ciri keberhasilan kepala desa dalam melakukan aktivitasnya, yaitu sikap penuh perhatian dan pertanggungjawaban dan pantang menyerah, mudah dipahami, dan manajemen kerja yang baik.

Dalam peran penting kepala desa melakukan dan melaksanakan tugas kewajibannya serta tanggung jawabnya, maka kepala desa bukan saja hanya berfungsi menyampaikan tugas pekerjaannya kepada pegawai, tetapi lebih dari itu kepala desa haruslah memiliki pribadi yang menguntungkan dan kondusif bagi pegawai untuk mencapai tingkat suasana kerja yang optimal. Paduan antara pribadi yang positif dari kepala desa dengan kemampuannya dalam melaksanakan manajemen kerja adalah dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai sehingga tercapainya tujuan kerja yang efektif dan efisien. Kemampuan ini akan disenangi oleh pegawai sehingga akan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas juga dapat didefinisikan yaitu merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Efektivitas juga dapat diartikan adalah sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan².

Indikator Efektivitas adalah penentu efektif atau tidaknya suatu organisasi. Oleh sebab itu digunakan indikator-indikator efektivitas sebagai tolak ukur efektivitas kepemimpinan kepala desa di desa Sidomulyo. Indikator-indikator menjadi tuntutan suatu organisasi pemerintah untuk memenuhi kriteria efektivitas yang telah ditetapkan. Karena organisasi pemerintah adalah sejumlah Lembaga Negara yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara, Organisasi Negara tersebut dibentuk untuk mewakili upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu desa sebagai organisasi Negara perlu memiliki indikator efektivitas yang baik sebagai standar penilaian keberhasilan suatu efektivitas kepemimpinan secara maksimal.

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang ingin dikehendaki. Dan indikator-indikator merupakan salah satu bentuk kinerja yang akan dilakukan dalam keberhasilan efektivitas kepemimpinan kepala desa untuk mencapai tujuan bersama demi menciptakan kesejahteraan rakyat.

² <http://e-journal.uajy.ac.id/42441/3/2MH01723.pdf> diakses pada tanggal 13 juli pada pukul 16.00

2.2 Pengertian Kepemimpinan

Istilah pemimpin dan memimpin pada mulanya berasal dari kata dasar yang sama "pimpin", dan berikut ini dikemukakan beberapa pengertian pemimpin:

1. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.
2. Pemimpin adalah suatu lakon/peran dalam sistem tertentu; karenanya seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Istilah *kepemimpinan* pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang; oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang buan "pemimpin".
3. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu memengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.³

Kepemimpinan juga adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

³ Veithzal, dkk, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi kedua, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2013, hal.1

Istilah Kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” lahir kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing dan menuntun dari kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun.⁴ Pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disuatu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian suatu sasaran dan tujuan.

Rost berpendapat bahwa kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata dan mencerminkan tujuan yang sama.

Sedangkan menurut Locke menegaskan beberapa indikator dasar kepemimpinan yakni sebagai berikut:

- a. Suatu kesediaan untuk menciptakan kesesuaian paham
- b. Suatu bentuk persuasi dan inspirasi
- c. Suatu kepribadian yang memiliki pengaruh
- d. Suatu tindakan dan perilaku
- e. Suatu titik sentral proses kegiatan kelompok
- f. Suatu hubungan kekuatan dan kekuasaan. Dalam hal ini kepemimpinan adalah suatu bentuk hubungan sekelompok orang, hubungan antara yang memimpin, proses saling mendorong dalam pencapaian tujuan yang sama⁵.

⁴ Pamuji, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 1986, hal.5

⁵ <http://shokibfisipunitri.blogspot.com/2014/05/kepemimpinan-dalam-pelayanan-publik.htm> diakses pada tanggal 20 Juli pukul 14.00

Menurut Kartono kepemimpinan adalah suatu pengeneralisasian dari suatu seri fakta mengenai sifat sifat dasar dan perilaku pemimpin dan konsep konsep pemimpin.⁶ Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian pada sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati sehingga orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut.

Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu Administrasi Negara. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan ketaatan para pengikut karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin.

Menurut Rivai, kepemimpinan dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses, dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati dan orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang telah dikehendaki oleh pemimpin tersebut, dengan demikian sebagai proses untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dimana definisi kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen yakni :

⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Edisi. 1, Jakarta: Penerbit Rajawali pers, 2010, hal.3.

1. Kepemimpinan merupakan proses.
2. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungannya) antara pimpinan dan bawahannya.
3. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain.⁷

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan orang orang yang berada di bawah koordinasinya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan suatu organisasi.

2.2.1 Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori-teori kepemimpinan, maka berikut ini akan diuraikan beberapa teori kepemimpinan

Ada beberapa teori kepemimpinan yang harus dipahami terkait kepemimpinan yaitu :

1. Teori Karakter

Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter - karakter tertentu yang mampu mensukseskan kepemimpinan. Contohnya, seperti karakter fisik, inteligensi, kategasan dan sebagainya. Teori ini dipercaya oleh banyak orang, tetapi tak jarang dihampiri kritik, salah satunya terkait karakteristik fisik.

⁷ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan yang efektif* .hal.74

2. Teori Perilaku

Dalam teori perilaku, dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua yang pertama adalah *job centered* dan yang kedua adalah *employee centered*.

Job centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan. Sementara itu, *employee centered* berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan disebuah proyek.

3. Teori Kepemimpinan Situasional

Teori ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun, yang jelas kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja, tetapi juga para bawahan.

2.2.2 Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan memudahkan tercapainya sasaran kelompok. Dalam organisasi modern, fungsi kepemimpinan dapat dilaksanakan oleh beberapa peserta. Akan tetapi, pujian atau ucapan karena sukses atau gagal, biasanya ditujukan pada individu-pemimpin formal. Fenomena ini tampak jelas dalam semua organisasi, tetapi terutama menonjol dalam dunia sport, di mana para pelatih dan manajer adalah dipuji sebagai pahlawan atau dicaci, fakta bahwa variable yang memengaruhi prestasi tim, termasuk nasib.

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus di jalankan sesuai dengan fungsinya. Pemimpin harus berusaha agar

menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi social dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing masing yang mengisyatkan bahwa setiap pemimpin berada didalam dan bukan diluar situasi. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala social, karena harus diwujudkan dalam intraksi antar individu didalam situasi social suatu kelompok atau organisasi karena fungsi kepemimpinan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi, tanpa ada penjabaran yang jelas tentang fungsi pemimpin mustahil pbagian kerja dalam organisasi dapat berjalan dengan baik.

Menurut Kartono menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan adalah sebagai kegiatan memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi, atau membangun motivasi motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan jaringan komunikasi organisasi yang baik, memberikan motivasi atau pengawasan yang efisien dan membawa para pengikut kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.⁸

Menurut Nawawi dalam bukunya kepemimpinan yang efektif menyebutkan ada lima fungsi kepemimpinan. Kelima fungsi kepemimpinan itu adalah:

1. Fungsi instruktif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah, pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada

⁸ Kartini Kartono, **Op.Cit**, Hal.93.

orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah itu, sepenuhnya merupakan fungsi pemimpin.

2. Fungsi konsultatif

Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, fungsi pemimpin sebagai konsultan untuk mendengar pendapat, saran serta pertanyaan dari bawahannya, mengenai keputusan yang akan diambil oleh pemimpin.

3. Fungsi partisipasi

Dalam fungsi ini pemimpin menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompoknya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Pemimpin juga tidak hanya ikut dalam proses pembuatan keputusan dalam fungsi ini, pemimpin ikut serta dalam proses pelaksanaannya. Fungsi partisipasi ini bukan berarti pemimpin memberikan kebebasan semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

4. Fungsi delegasi

Fungsi ini memimpin sebagai pemegang wewenang tertinggi harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi atau jabatannya, apabila diberi atau mendapatkan pelimpahan wewenang.

5. Fungsi pengendalin

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam kondisi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sehubungan dengan itu bahwa fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.⁹

Dengan bimbingan dan pengarahan, koordinasi dan pengawasan, pemimpin berusaha mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan setiap unit atau perseorangan dalam melaksanakan volume dan beban kerjanya atau perintah dari pimpinannya. Pengendalian dilakukan dengan cara mencegah anggota berfikir dan berbuat sesuatu yang cenderung merugikan kepentingan bersama.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi kepemimpinan adalah suatu kegiatan memandu, membimbing, yang berhubungan langsung dengan situasi sosial yang efektif, tepat sasaran guna mencapai suatu tujuan tertentu.

⁹Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Hal. 75

2.2.3 Gaya Dan Tipe Kepemimpinan

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperemen, watak dan kepribadian tersendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain.

Menurut Hadari Nawawi bahwa aktifitas kepemimpinan dipilah-pilah maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing masing. Gaya kepemimpinan dengan polanya masing masing. Gaya kepemimpinan ini gilirannya ternyata merupakan dasar dalam membeda-bedakan atau mengklasifikan tipe kepemimpinan.¹⁰

Dari banyaknya studi kepemimpinan di ketahui ada beberapa gaya kepemimpinan yang paling umum di kenal, yaitu :

1. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Kharismatis

Tipe kepemimpinan Kharismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bias dipercaya. Sampai sekarang pun orang tidak mengetahui benar sebab-sebabnya, mengapa seseorang itu memiliki karisma begitu besar. Dia dianggap mempunyai kekuatan ghaib (supernatural power) dan kemampuan-kemampuan superhuman, yang diperolehnya sebagai karunia yang Mahakuasa. Dia banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri.

¹⁰ Nawawi, Hadari, *Ibid.*, Hal.83

2. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Otoriter

Kepemimpinan otoriter itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak dan harus dipatuhi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya. Pemimpin bergaya dan bertipe otoriter selalalu berdiri jauh dari anggota kelompoknya, dan ia senantiasa ingin berkuasa absolut, tunggal pada kondisi dan situasi yang sikap dan prinsipnya yang kaku. Penonjolan diri yang berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi, hingga cenderung bersikap bahwa dirinyadan organisasi adalah identik. Dalam menentukan dan menerapkan disiplin organisasi begitu keras dan menjalankannya dengan sikap yang kaku, pemimpin bergaya dan bertipe ini juga tidak dapat dikritik, bawahannya juga tidak akan mendapat kesempatan untuk memberikan saran maupun pendapat, kalau pemimpin ini sudah mengambil keputusan yang biasanya keputusan itu berbentuk perintah dan bawahannya hanya melaksanakannya saja.

3. Gaya dan Tipe Paternalistik

Gaya dan tipe paternalistik merupakan kepemimpinan yang bersifat kepatuhan, namun bukan tipe ideal dan bukan tipe yang didambakan. Seorang pemimpin paternalistik senang menonjolkan keberadaanya dirinya sebagai simbol organisasi dan memperlakukan bawahannya sebagai orang-orang yang belum dewasa, ia tidak akan mendorong kemandirian bawahannya karena karena tidak ingin mereka berbuat kesalahan, terkait dengan itu maka pemimpin paternalistik bersifat terlalu melindungi, itikadnya mungkin baik tetapi prakteknya akan negatif karena ia tidak akan mendorong para bawahannya untuk mengambil resiko disebabkan takut akan timbul dampak negatif pada organisasi.

Dalam pengambilan keputusan pemimpin paternalistik menjadi pusat pengambilan keputusan dimana pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi tidak terjadi

4. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Demokratis

Gaya dan tipe kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang berorientasi pada memberikan bimbingan yang efektif kepada para bawahannya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahannya, dengan penekanan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Ia rela dan mau melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahannya sedemikian rupa tanpa kehilangan kendali organisasinya, dan tetap bertanggung jawab atas tindakan para bawahannya. Pemimpin demokratis bersifat mendidik dan membina, dalam hal bawahannya berbuat kesalahan dan tidak serta merta bersifat menghukum atau mengambil tindakan punitive.

5. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Administratif atau Eksekutif

Kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Sedangkan para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator-administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah yaitu untuk memantapkan integrasi bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada umumnya. Dengan kepemimpinan administrative ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industry, manajemen modern dan perkembangan sosial di tengah masyarakat.¹¹

¹¹ Kartini Kartono, Op.Cit. Hal.80

Setelah mengetahui berbagai gaya dan tipe kepemimpinan, maka pertanyaan yang akan timbul adalah: Gaya kepemimpinan yang manakah yang lebih baik? Untuk menjawab pertanyaan ini memang sulit, karena tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi tertentu walaupun ia sebenarnya adalah pemimpin yang sering bergaya demokratis. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti tujuan, pengikut (bawahan), organisasi dan situasi yang ada sehingga tidak ada gaya kepemimpinan yang mutlak atau buruk.

Oleh karena itu dalam rangka mempersoalkan gaya gaya kepemimpinan, kita hendaknya jangan beranggapan bahwa seseorang pemimpin harus tetap konsisten untuk mempertahankan gaya kepemimpinannya dalam segala situasi, hal ini justru mungkin akan memperburuk keadaan organisasi yang dipimpinnya, tapi sebaliknya harus bersifat fleksibel, yakni menyesuaikan gayanya sesuai dengan situasi, kondisi dan individu dalam organisasi yang sedang ia hadapi.

2.2.4 Model-model Kepemimpinan

a. Kepemimpinan Partisipatif dan Pendelegasian

Kepemimpinan partisipatif (*participative leadership*) adalah suatu kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi-situasi yang berlainan.

b. Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan Karismatik merupakan perpanjangan dari teori atribusi. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi dari

kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa bila mereka mengamati yaitu perilaku-perilaku tertentu.

c. **Kepemimpinan Transformasional.**

Kepemimpinan transformasional adalah tipe kepemimpinan yang memadu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Pemimpin jenis ini yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang di individualkan, dan yang memiliki karisma.¹²

2.2.5 Unsur-unsur Mendasari Kepemimpinan

- Kemampuan Memengaruhi orang lain (kelompok/bawahan).
- Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok.
- Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan

2.3 Kepala Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan “Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.”¹³

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari Pemerintah desa dan dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh masyarakat

¹² Ibid, hal.13

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2014

setempat yang mana ia adalah seorang wakil perpanjangan tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga, dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) menyebutkan bahwa kepala desa memegang masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya, Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usul dan prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembangunan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dari tugas tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Fungsi pemerintah merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun fungsi tugas pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu :

1. Fungsi Instruktif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Hal ini tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinya.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilakukan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya kepercayaan .

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Berdasarkan pasal 26 Undang-undang No.6 Tahun 2014 bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pula pada ayat (1) kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. Mengangkat dan memerhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. Menetapkan peraturan desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa memanfaatkan teknologi tepat guna.
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- m. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh fungsi pemerintah desa tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan dalam aktivitas pemerintah desa secara integral. Pelaksanaan berlangsung desa pemerintah berkewajiban menjabarkan program kerja sebagai berikut:

Pemerintah desa harus berusaha mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat.

- 1. Pemerintah desa harus berusaha memberikan petunjuk yang jelas.
- 2. Pemerintah desa harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- 3. Pemerintah desa harus mampu mengembangkan kerjasama yang harmonis.
- 4. Pemerintah desa harus mampu menumbuh dan mengembangkan kemampuan dan memiliki tanggung jawab.
- 5. Pemerintah desa harus mampu mendayagunakan pengawaaan sebagai alat pengendali.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal.

Partisipasi mengaktifkan ide Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokratis deliberative. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lainnya. Dalam hal ini, partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka terbukanya jalan bagi tercapainya HAM.

Partisipasi sering disangkut pautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis.

Dalam hal lain, Partisipasi Masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.

2.4.1 Bentuk Partisipasi yang nyata yaitu :

a. Partisipasi Uang

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk mempelancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.

c. Partisipasi Keterampilan

Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

2.4.2 Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat

- a. Keterlibatan peserta didik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses mengajar.
- b. Kemauan peserta didik untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal, yaitu :

- Usia
- Tingkat Pendidikan
- Jenis Pekerjaan

b. Faktor eksternal, yaitu :

- Komunikasi
- Kepemimpinan

2.5 Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan Masyarakat Desa diidentifikasi dengan setiap bentuk usaha-usaha perbaikan setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama.

Berhasil atau gagalnya suatu Pembangunan Masyarakat Desa akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan saran badan tersebut sekurang-kurangnya mendengarkannya. Pada mulanya, masyarakat lebih dipengaruhi oleh apa yang telah dikerjakan petugas pada masa lalu daripada apa yang sedang dikerjakannya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Tujuan utama dari pembangunan ini adalah memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.¹⁴

Sementara substansi dari kebijakan pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh pemerintah

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1999, hal. 56

secara bersama-sama dengan pihak rakyat yang dikuasai dan diatur atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.

Dalam proses perencanaan suatu pembangunan, diawali dengan kebijakan pembangunan. Pada kebijakan pembangunan haruslah menaati ketentuan yang benar-benar ditaati, dihayati, dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan strategi, sasaran, dan seluruh rencana pembangunan, serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan semua kegiatan pembangunan daerah. Terdapat banyak aspek dan masalah yang diketahui termasuk kedalam pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat dilihat dari suatu sudut pandang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan pembangunan, terutama bukan karena orang tidak paham yang dimaksud dengan pembangunan itu, tapi justru karena ruang lingkup pembangunan tersebut begitu banyak, sehingga hampir tidak mungkin untuk menyatukan semuanya menjadi suatu bentuk rumusan sederhana sebagai suatu definisi yang komplit.

Pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Dengan demikian kiranya jelas bahwa sesuatu bangsa yang sedang membangun tidak mungkin dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa bangsa itu bersikap acuh tak acuh terhadap pembangunan.

Menyerahkan kegiatan pembangunan-pembangunan itu hanya kepada pemerintah adalah suatu hal yang perlu dicegah. Pada hakekatnya partisipasinya seluruh masyarakat (*scietal participation*) merupakan salah satu tugas dan kewajiban setiap anggota masyarakat untuk ambil andil dalam pembangunan.

2.6 Infrastruktur

Istilah pembangunan juga memajukan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara *Etimologi*, pembangunan berasal dari kata bangun, di awalan “pe” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal orang membangun atau perihal bagaimana pekerjaan pembangunan itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti. Pertama, bangun dalam arti sadar atau siuman. Kedua, berarti bentuk. Ketiga, bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan, Dilihat dari segi ini, konsep pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep ini menunjukkan pembangunan sebagai :¹⁵

- a. Masukkan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa
- b. Proses, yaitu membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
- c. Keluaran, yaitu berbagai bentuk bangunan sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik.

Infrastruktur terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Infrastruktur fisik dan Infrastruktur social. Yang dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang

¹⁵Sondang P. Siagian, Op. Cit, hal. 4

diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan social dan ekonomi.

Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem social dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Pengembangan pedesaan harus ditinjau pada cakupan yang lebih luas tidak hanya mengenai hal-hal teknik, social dan kultural yang berpengaruh pada pedesaan tetapi juga aspek politik dan kebijakan umum lainnya. Sehingga pengembangan pedesaan itu sebagai suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk disertai meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut.¹⁶

2.7 Desa

Desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat,

¹⁶Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta : Penerbit CV Rajawali, 1992, Hal. 9

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁷

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa.

2.7.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Desa Untuk Berprestasi

Dalam bekerja, keberhasilan tidak terlepas dari berbagai faktor dukungan dalam mencapai prestasi di antaranya sebagai berikut :

a. Dorongan untuk Berprestasi

Dorongan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan baik sepatutnya muncul dari kepala desa dan masyarakat dalam upaya memajukan desanya sehingga berprestasi dalam segala bidang, baik ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Dorongan untuk mendapatkan prestasi akan muncul bila kegiatan yang dilakukan dirasakan mempunyai nilai instrinsik. Untuk memajukan desa dan mengembangkannya menjadi desa berprestasi.

¹⁷ Tabrani, 2017, *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, hal.50

Kepala desa mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan untuk melatih keterampilan yang pelaksanaannya terencana, tertib, dan teratur.

b. Minat Bekerja untuk Desa Berprestasi

Minat bekerja sangat penting, karena merupakan salah satu unsur kepribadian yang memegang peranan penting dalam pekerjaan. Minat untuk berprestasi akan mengarahkan tindakan terhadap suatu objek atas dasar senang, sehingga menimbulkan gairah bekerja. Minat bekerja dapat diketahui dari kecenderungannya tertarik atau tertarik terhadap pekerjaan dan mengamalkannya untuk maksud baik-baik.

Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan proses terarah pada situasi-situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi keputusan kepadanya. Minat dapat menimbulkan sikap yang merupakan suatu kesiapan berbuat bila ada stimulasi sesuai dengan keadaan tersebut, minat merupakan suatu kesukaan, kegembiraan, atau kesenangan akan sesuatu.

c. Cita-cita untuk Desa Berprestasi

Cita-cita yang diperlukan oleh kepala desa adalah agar desanya maju, berkembang, dan berprestasi dan banyak lagi cita-cita yang lainnya. Maka dari itu, agar cita-cita yang dikehendaki tercapai, kepala desa harus bekerja dan mendapatkan prestasi yang baik, sebab kepala desa menempati posisi yang amat strategis dalam memimpin desanya. Kepala desa harus bekerja secara efektif dan efisien sehingga mempunyai tingkat hasil guna yang tinggi. Artinya, hasil yang diperoleh seimbang dengan masukan yang diolah, yaitu melalui berbagai perbaikan dalam meningkatkan prestasi kerja agar waktu tidak terbuang sia-sia.

d. Menentukan Tujuan Kerja

Perilaku kerja pada dasarnya berorientasi pada tujuan, artinya bahwa perilaku dalam melaksanakan pekerjaan biasanya didorong oleh cita-cita untuk mencapai tujuan dan harus selalu diamati, diawasi, serta diarahkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perilaku dalam kehidupan pekerjaan tidak bertentangan dengan norma, aturan, dan undang-undang yang berlaku.

e. Etika untuk Berprestasi

Dalam meningkatkan prestasi kerja, kepala desa sebagai pemimpin masyarakat memegang peranan yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Prestasi yang ingin dicapai kepala desa perlu diupayakan melalui etika kerja. Jika tidak memiliki etika kerja sudah tentu tidak memiliki kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga prestasi yang ingin dicapai tidak berhasil.

f. Pola Kepribadian Kepala Desa

Salah satu faktor pendukung untuk mendapatkan prestasi dari mutu kegiatan bekerja adalah kepribadian. Kepribadian itu perlu diketahui dan dipelajari sebab setiap kepala desa punya kepribadian yang berbeda, baik pola pikir maupun dalam merespons berbagai persoalan yang baru diketahuinya.

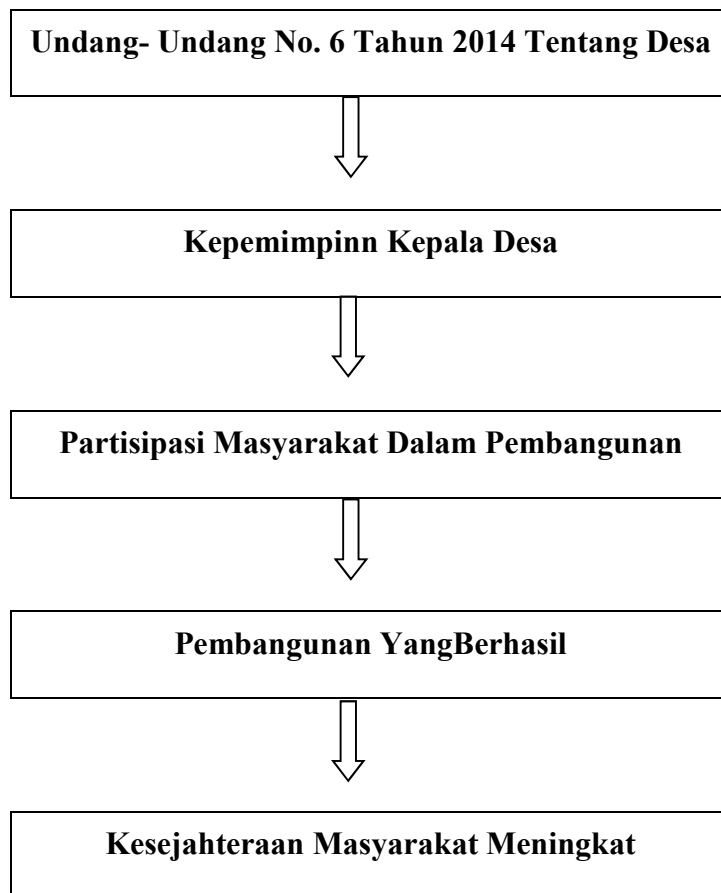
g. Ambisi dan Aspirasi

Ambisi berarti suatu keinginan untuk memperoleh kehormatan, kekuasaan, atau pencapaian sesuatu. Sebaliknya aspirasi berarti keinginan akan sesuatu yang lebih tinggi, dengan kemajuan sebagai tujuannya. Perbedaan di antara kedua

istilah itu adalah bahwa aspirasi menekankan keinginan untuk lebih maju melebihi status pada saat sekarang sedangkan ambisi menekankan hasil akhir kekuasaan, kehormatan, atau prestasi tertentu.

2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



Keterangan: Undang-undang No.6 Tahun 2014 Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan “kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat

dan sebagai pemimpin masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa adalah dimana kepala desa sebagai pemimpin dalam suatu wilayah pedesaan yang menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, mengkomunikasikan, dan mengorganisasikan. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Kepala Desa dengan masyarakat harus bekerja sama yang baik, agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dapat berupa tenaga, ide, uang/benda. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan didalam pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Partisipasi yang dapat dilakukan oleh Masyarakat adalah Gotong-royong. Dengan kerjasama yang baik antara Kepala desa dengan Masyarakat pembangunan pun dapat terlaksana dengan baik. Seperti pembangunan parit/selokan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan Masyarakat pembangunan infrastruktur pun terlaksana dengan efektif dan efisien yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang baik.

Definisi Konsep

1. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Kepemimpinan Kepala Desa yaitu sebagai pemimpin dalam suatu wilayah pedesaan, yang menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, mengoordinasikan kepada masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa.

3. Partisipasi Masyarakat adalah merupakan sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat yang dimana saling berpartisipasi dalam proses kinerja di desa.
4. Pembangunan Infrastruktur Desa adalah pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pengarahannya, bantuan serta fasilitas yang dibutuhkan, sedangkan masyarakat memiliki kewajiban memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong, pada setiap pembangunan terlebih pembangunan infrastruktur Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode.

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk melakukan penelitian. Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. “Sesuai dengan pendapat Creswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan”.¹⁸ Oleh

¹⁸ Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Metode kualitatif, kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hal 4

karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif juga digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan .

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di desa Sidomulyo Kecamatan Sibiru-biru. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks peneliti yaitu mengenai Efektivitas Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Waktu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini berlangsung selama 7 hari terhitung mulai dari tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 11 Februari.

3.3 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pengamatan langsung mengenai manajemen dana desa terhadap pembangunan desa dalam perspektif

ekonomi Desa .

Yang menjadi informan dalam penelitian adalah :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Desa.
2. Informan Utama yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini adalah Kaur Pembangunan
3. Informan Tambahan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan penelitian. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan informan kunci atau informan utama. Jumlah informan tambahan tidak bisa ditentukan secara langsung oleh peneliti, peneliti bisa saja menambah informan jika peneliti merasa informasi yang diterima dari informan kunci atau utama masih dirasa kurang dan jika peneliti sudah menambah informan tetapi informasi yang diterima peneliti sama dengan informasi yang diterima dari informan-informan sebelumnya atau informasi yang diterima sudah jenuh maka peneliti dapat menghentikan penelitian. Teknik yang dilakukan adalah *Snowball sampling*. Informan tambahan adalah masyarakat Desa Sidomulyo.

3.4 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber aslinya.

2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai data utama dimana nantinya peneliti akan melakukan penelitian langsung kelapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang yang menjadi informan dan menggunakan data sekunder sebagai pendukung data utama.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara kualitatif, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan partisipan.
2. Dokumen-dokumen kualitatif, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen privat

(misalnya buku harian, surat dan e-mail).

3.5 Teknik Analisis Data

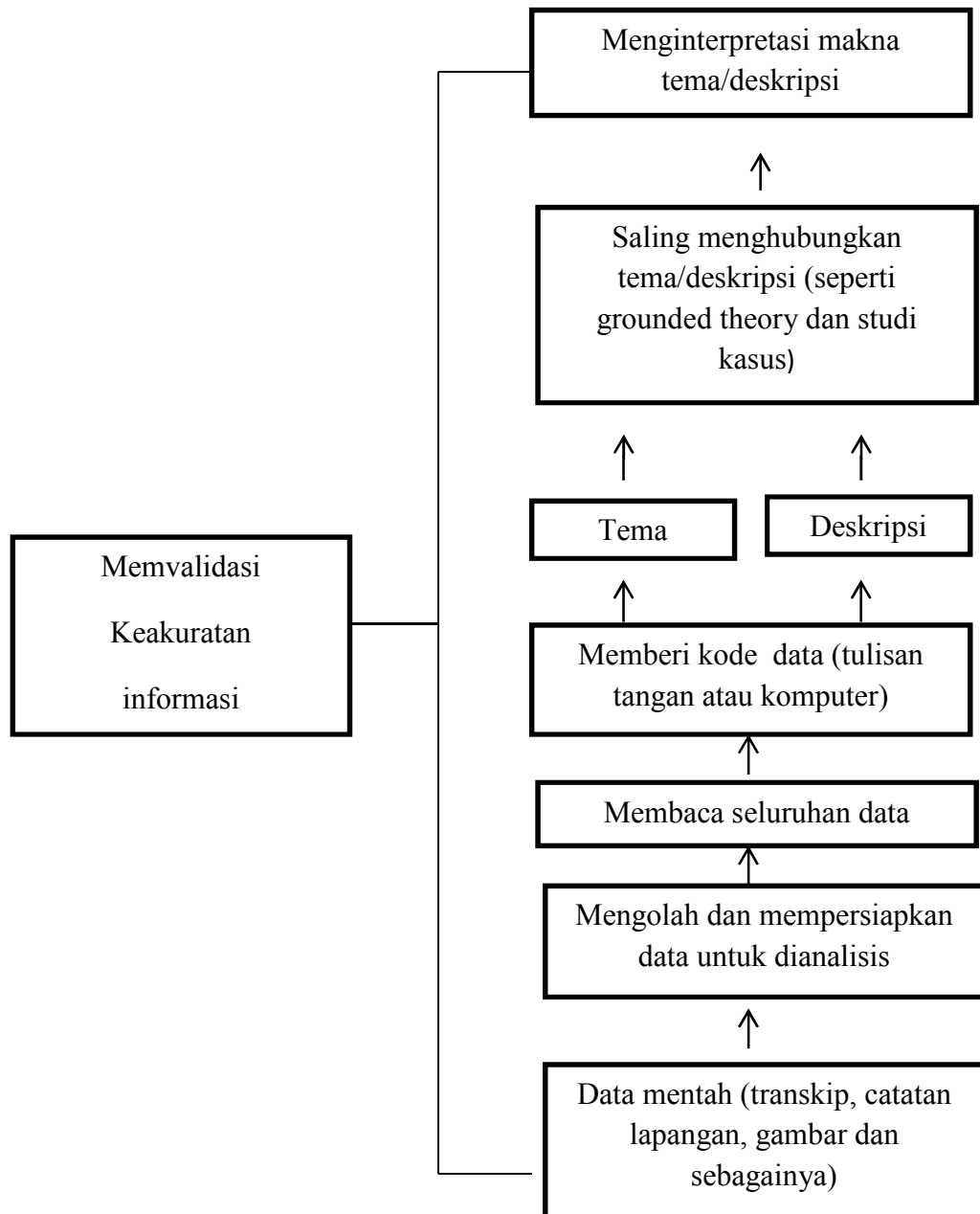
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau meilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan *men-coding* data. Coding merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf) kedalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus.

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3:2

Teknik Analisis Data



Sumber : Creswell, Edisi Keempat, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2017, hal 263

